

PENILAIAN PROF GABRIEL LELE Program Transmigrasi di Papua, Dibutuhkan

YOGYA (KR) - Guru Besar UGM Prof Gabriel Lele menilai program transmigrasi di Papua masih dibutuhkan. Namun, membutuhkan persiapan matang supaya membawa dampak positif dalam upaya percepatan transformasi di sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.

"Menurut saya, transmigrasi masih dibutuhkan di Papua. Hal yang menjadi permasalahan adalah penyiapan transmigrannya dan orang asli Papua. Orang yang dikirim ke Papua adalah yang memiliki daya juang tinggi," kata Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof Gabriel Lele, Sabtu (16/11).

Menurutnya, transmigran akan melejit secara ekonomi, sementara orang asli Papua di sekitar daerah itu masih begitu-begitu saja. Hal ini akan menimbulkan marginalisasi dan De-Papuanisasi, bahkan di beberapa kasus kehadiran transmigran ini menyebabkan etno nasionalisme masyarakat Papua, bahwa Ras Melanesia tidak bisa bertemu, bersatu dan bergabung dengan Ras Melayu.

Kemudian, ada dampak positif juga dari program transmigrasi di Papua. Kehadiran transmigran yang melakukan hal baik, ditiru orang Papua, misalnya kebiasaan bertani. Di Jayapura, masyarakat Papua mulai bisa menanam sawi, kangkung, tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tapi dijual. "Mereka belajar dari transmigran," katanya.

Prof Gabriel menilai pemerintah pusat juga harus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Papua dalam pelaksanaan program trans-



Prof Gabriel Lele

migrasi supaya tidak menimbulkan konflik sosial. Menteri Transmigrasi harus bertanya kepada Gubernur Papua soal transmigrasi. Teman-teman Papua memperjuangkan agar urusan transmigrasi menjadi kewenangan dalam otonomi khusus.

Menurutnya, program transmigrasi yang diselenggarakan atau disponsori oleh pemerintah justru gampang solusinya, yaitu pemerintah tidak perlu menyelenggarakan transmigrasi. Transmigrasi yang perlu diatur adalah transmigrasi yang sifatnya selfsponsor atau orang datang dengan mencari peruntungan, apakah ada kenalan dengan orang yang di Papua atau keluarga. Jumlah transmigrasi selfsponsor luar biasa. Belum lagi migrasi yang dibawa perusahaan yang jumlahnya relatif tidak terkontrol.

Ia mengatakan, transmigran yang mengikuti transmigrasi, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun selfsponsor merupakan orang-orang yang punya daya juang tinggi atau orang-orang kompetitif. Mereka akan berhadapan dengan orang Papua yang di banyak daerah, relatif tidak bisa berkompetisi. (Ant)-f

PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS Jadi Wadah Pendidikan Karakter

SIDOARJO (KR) - Menteri Pendidikan Dasar dan menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berharap program makan siang gratis pemerintah menjadi wadah pendidikan karakter. Selain itu, juga meningkatkan asupan gizi bagi para siswa di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mu'ti dalam pembukaan Milad Muhammadiyah ke-112 di Sidoarjo yang disertai pemberian secara simbolis 172 ribu porsi makan siang sehat dan bergizi gratis untuk seluruh siswa Muhammadiyah, baik dari jenjang PAUD hingga SMA di Jawa Timur. "Kami berharap program makan siang gratis ini tidak hanya sebagai peningkatan gizi bagi siswa, melainkan juga menjadi pendidikan karakter," ujar Mu'ti di Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (16/11).

Mendikdasmen menjelaskan, dari program makan gratis yang sudah ia kunjungi, ada banyak hal yang bisa dipelajari siswa

terutama tentang kedisiplinan dan toleransi. Mu'ti menjelaskan, dalam program makan siang bergizi gratis yang dilakukan secara prasmanan (siswa mengambil makanan sendiri), siswa dapat belajar untuk antre ketika mengambil makanan yang merupakan contoh dalam hal kedisiplinan.

Selain itu siswa juga bisa belajar untuk toleransi terhadap siswa lain untuk tidak mengambil makanan secara berlebihan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mu'ti juga menilai, dalam beberapa contoh, siswa bisa belajar tentang kemandirian dan tanggung jawab dengan mencuci sendiri peralatan



Mendikdasmen Abdul Mu'ti bercengkerama dengan siswa SMA Muhammadiyah 1 Taman dalam kunjungannya di Sidoarjo, Sabtu (16/11/2024).

an makan agar bisa digunakan kembali keesokan harinya.

"Tujuannya agar kita mencetak generasi muda yang berkarakter disiplin, toleran dan mandiri serta penuh tanggung jawab," ujar Mu'ti.

Selain itu, ia juga menjelaskan Kemendikdasmen sedang men-

dalam program Tujuh Kebiasaan Anak Hebat yang akan diluncurkan pada awal 2025. Program tersebut berpusat pada kebiasaan sehari-hari yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat serta tidur cepat. (Ant)

UNSA Targetkan PTS Berbasis Entrepreneurship

KARANGANYAR (KR) - Universitas Surakarta (UNSA) menargetkan menjadi kampus berbasis entrepreneurship pada tahun 2030. Perguruan tinggi swasta (PTS) ini juga diproyeksikan menjadi universitas berstandar internasional, yang saat ini telah dirintis dengan menjalin kerja sama dengan sivitas akademika di dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta Dr Drs Margono SE MM dalam konferensi pers Dies Natalis ke-26 dan Wisuda UNSA Tahun 2024, kemarin. "Saat ini, UNSA menjalani pembinaan dan pembenahan di berbagai bidang agar berkembang sesuai visi misi yang ditetapkan. Tahun 2030, diharapkan sudah menjadi universitas unggul berbasis en-

trepreneurship dan berskala internasional," tuturnya.

Plt Rektor UNSA Dr Budi Purnomo MHum mengatakan, sejak 2002 hingga 2024, UNSA sudah meluluskan 13.615 wisudawan yang tercatat di PPDIK-TI. "Untuk mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini se-

banyak 475 lulusan dari tujuh fakultas," katanya.

Wisuda Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) diselenggarakan Sabtu (16/11) di De Tjolomadoe, yang merupakan rangkaian dari peringatan Dies Natalis ke-26. "Ada beberapa hal yang berbeda antara wisuda

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lulusan tahun ini telah mengikuti berbagai program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka," jelasnya.

Bentuknya antara lain pertukaran mahasiswa di dalam dan luar negeri, KKN Tematik Membangun Desa Cerdas dan Desa Wisata, Wirausaha Merdeka, Kampus Mengajar dan magang bersertifikat.

"Beberapa wisudawan dari Prodi S1 Ilmu Hukum tahun ini lulus tanpa skripsi, karena telah menulis artikel ilmiah dan terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi," katanya.

Pihaknya mengapresiasi hal tersebut dan berharap di tahun-tahun mendatang semakin banyak wisudawan yang menyelesaikan studinya melalui tugas akhir nonskripsi. (Lim)-f



Para pengelola yayasan dan jajaran Rektorat UNSA.

EKONOMI

PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN OJK dan FSS Korea Perkuat Kerja Sama

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan bilateral dengan Financial Supervisory Service (FSS) Korea untuk membahas kerja sama dan koordinasi terkait pengawasan lintas batas terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) dan potensi kerja sama di masa depan.

"Kedua otoritas perlu melakukan pembahasan yang mendalam tentang pengawasan institusi keuangan milik Korea di Indonesia termasuk rencana bisnisnya untuk melihat gambaran yang lebih mendalam terhadap kondisi yang ada saat ini," kata Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/11).

Pertemuan dipimpin Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar dan Gubernur FSS Korea Lee Bokhyun di Jakarta, Jumat (15/11), dengan memfokuskan pada aspek pengawasan LJK kedua otoritas, pengawasan lintas batas terhadap LJK Korea yang beroperasi di Indonesia dan koordinasi pengawasan. Mahendra menuturkan, pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan LJK dan mempererat hubungan bilateral OJK dengan FSS Korea.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur FSS Lee Bokhyun mengapresiasi pertemuan bilateral OJK dan FSS yang akan memperkuat kolaborasi antar kedua otoritas. "FSS terbuka untuk pertukaran data dan informasi dengan OJK dalam rangka me-



Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar (kiri) dan Gubernur Financial Supervisory Service (FSS) Korea Lee Bokhyun melakukan pertemuan.

ningkatkan kualitas pengawasan perbankan dan asuransi di masing-masing negara," kata Lee.

Saat ini terdapat satu bank milik Indonesia yang memiliki kantor cabang di Seoul, Korea yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara, terdapat enam bank dari Korea yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Bank KB Bukopin, PT Bank Woori Saudara Indonesia, PT Bank KEB Hana, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank IBK Indonesia dan PT Bank Oke Indonesia.

Pada sektor asuransi, Indonesia tidak memiliki perusahaan asuransi yang beroperasi di Korea, namun terdapat enam perusahaan asuransi Korea yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Hanwa Life Insurance Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,

PT Lippo General Insurance Tbk, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, PT Asuransi Samsung Tugu dan PT Meritz Korindo Insurance.

Kedua otoritas telah memiliki kerja sama formal dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani April 2015 lalu. Berbagai kegiatan pertemuan, seminar, study visit, pemeriksaan langsung, hingga secondment kerap dilaksanakan kedua otoritas sebagai bentuk implementasi kerja sama seperti yang disepakati dalam MoU tersebut.

Melalui pertemuan tersebut, kedua otoritas menguatkan komitmen untuk terus menjalin dan memperkuat kerja sama bilateral khususnya koordinasi pengawasan di sektor jasa keuangan. (Ant/Lmg)-f

Industri Fintech Berkontribusi bagi Perekonomian

JAKARTA (KR) - Perusahaan teknologi keuangan digital Trans Digital Cemerlang (TDC) meyakini, industri fintech ke depan semakin berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Direktur Utama TDC Indra menilai, bisnis digital di Indonesia semakin berkembang pesat didukung kemajuan infrastruktur internet ke seluruh desa, sosialisasi masif terkait keamanan digitalisasi dan payung hukum yang kuat.

"Ketertarikan masyarakat yang semakin tinggi terkait digitalisasi serta kolaborasi perusahaan, asosiasi dan pemerintah yang solid, semakin membesarkan bisnis digital ini ke seluruh pelosok Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan perekonomian negara," ujar Indra dalam keterangan di

Jakarta, Sabtu (16/11).

TDC baru mengikuti gelaran Indonesian Fintech Summit & Expo pada 12-13 November 2024, yang merupakan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan sejumlah asosiasi fintech. Menurut Indra, terselenggaranya acara tersebut bukti kuatnya dukungan pemerintah dan asosiasi fintech terhadap ekosistem bisnis digital di Indonesia.

"Animo publik begitu luar biasa, terbukti dengan booth kami yang menghadirkan produk M2PAY dan Posku Lite ramai didatangi pengunjung. Dari situ kami melihat bahwa

pemahaman bisnis digital di mata masyarakat sudah on the track dan ini berkat dukungan pemerintah dan asosiasi seperti Aftech," kata Indra.

Indra juga memastikan perusahaannya berkomitmen mengedepankan perlindungan konsumen sesuai dengan arahan OJK. TDC sudah membentengi diri dengan memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

"Khusus ISO Sistem Keamanan Informasi, per-

usahaan melibatkan serangkaian langkah seperti penetapan kebijakan keamanan informasi, pengembangan dan implementasi kontrol keamanan yang tepat, penilaian risiko serta pemantauan dan peninjauan secara berkala. Perusahaan kami sudah dilengkapi itu, dan kami tergabung dalam Indonesia Fintech Association (Aftech)," ujar Indra.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, OJK mengահakan ekosistem keseluruhan keuangan digital di Indonesia agar selain bertumbuh dengan cepat namun juga menuju ke arah yang bisa memberikan manfaat. (Ant)-f

FEDERAL OIL HARAPKAN KONSUMEN

Beli Pelumas Sesuai Spesifikasi

JAKARTA (KR) - Federal Oil yang merupakan lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) dan telah berpengalaman membuat motor pengendaranya di tanah air pasti makin nyaman, konsisten melakukan koordinasi dan identifikasi bersama pihak terkait dalam mengungkap bengkel-bengkel atau penjual yang masih mengedarkan pelumas yang tidak sesuai spesifikasi.

Setelah melakukan pengungkapan pada bulan Mei 2024 lalu di wilayah Jakarta dan Banten, kali ini Federal Oil menindaklanjuti laporan masyarakat Jawa Tengah dengan mengungkap 3 bengkel yang mengedarkan produk-produk Federal Oil yang tidak sesuai spesi-

fikasi dan berbeda dengan yang dipasarkan resmi oleh Federal Oil

Total sekitar 37 karton produk Federal Oil yang tidak sesuai spesifikasi ditemukan di 3 bengkel yang berada di area Jawa Tengah. Mereka terbukti menjual produk Federal

Oil yang tidak sesuai spesifikasi setelah dilakukan pengecekan produk melalui laboratorium bersama pihak terkait dan Federal Oil juga rutin melakukan koordinasi serta sosialisasi bersama Asosiasi Pelumas Indonesia (Aspelindo) terkait bahaya

penggunaan pelumas yang tidak sesuai spesifikasi.

Rommy Averd, Market Development General Manager PT EMLI mengatakan, upaya yang dilakukan ini untuk meminimalisir peredaran pelumas yang tidak sesuai spesifikasi, karena masih marak peredarannya di pasar pelumas tanah air dengan iming-iming harga yang lebih murah.

Penggunaan pelumas yang tidak sesuai spesifikasi tidak hanya merugikan merek Federal Oil, tapi juga dapat merugikan konsumen karena menyebabkan mesin gampang panas dan mogok, bahkan kerusakan komponen mesin yang jika digunakan dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan turun mesin. (Rsv)-f



Produk pelumas sesuai spesifikasi.